

## ABSTRAK

Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM  
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP  
Nama : Ryan Palasi  
NRP : 1120922059  
Kata Kunci : Korporasi, Pidana, Lingkungan Hidup

Masalah tindak pidana lingkungan hidup di dalam sistem pemidanaan khususnya perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi merupakan masalah yang cukup rumit untuk ditanggulangi terutama menyangkut pertanggungjawaban pelaku dalam sistem pemidanaan. Perusakan lingkungan akibat kegiatan yang tidak memperhatikan fungsi pelestarian lingkungan dapat merusak ekosistem lingkungan hidup, untuk itu diperlukan usaha yang terpadu untuk menanggulunginya. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaturan kejahatan di bidang lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku korporasi di bidang lingkungan hidup dan Untuk mengetahui hambatan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup. Dengan metode penelitian normatif yuridis diketahui bahwa Kejahatan di bidang lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tindak pidana lingkungan hidup dikriminalisasi melalui perangkat hukum yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Undang-undang ini merupakan payung hukum dari undang-undang lain (sektoral) di bidang pelestarian lingkungan hidup. Pertanggungjawaban pelaku korporasi di bidang lingkungan hidup dapat mempergunakan asas *strict Liability* dan *vicarious Liability* yang telah dianut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pada dasarnya pertanggungjawaban mutlak merupakan suatu bentuk kejahatan yang di dalamnya tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan dalam pemidanaan, tetapi hanya disyaratkan adanya suatu perbuatan. Hambatan dalam penegakan hukum pelaku korporasi yang melakukan kejahatan di bidang lingkungan hidup dapat dilihat bahwa ketentuan sanksi pidana terhadap pencemaran lingkungan belum menjadi prioritas pemidanaan korporasi. Untuk meminta pertanggungjawaban korporasi maka asas tindak pidana tanpa kesalahan yang berlaku dalam hukum pidana selama ini menghambat penegakan hukum di sebabkan perangkat hukum perundang-undangan khususnya hukum pidana materil masih mengalami kelemahan karena adanya prinsip pertanggungjawaban karena adanya kesalahan dan melawan hukum sebagai syarat untuk pengenaan pidana.

## ABSTRACT

Title : Corporate Criminal Liability Of Pollution And Environmental Damage  
Name : Ryan Palasi  
NRP : 1120922059  
Key Word : Corporations, Criminal, Environment

Environmental crime issues in the criminal system, especially environmental destruction committed by the corporation is a fairly complicated problem to be addressed, especially regarding the perpetrators in the criminal system. Environmental degradation due to activities that do not pay attention to environmental preservation function may damage the ecosystem environment, it is necessary for a unified effort to address them. The purpose of this study was to determine the setting in the field of environmental crimes by Act No. 32 of 2009, to determine the accountability of corporate actors in the environmental field and to determine barriers to enforcement against corporate criminals in the environmental field. With the research method of normative juridical known that crime in the environmental field based on Law No. 32 of 2009 criminal offenses criminalized environment through legal instruments governing environmental protection and management of the Law No. 32 Year 2009 on Environmental Protection and Management ( PPLH ). This law is the legal umbrella of other legislation in the field of environmental protection. Accountability of corporate actors in the environmental field can use the principle of strict and vicarious Liability that has been adopted in Act No. 32 of 2009. Basically absolute liability is a form of evil that is in it does not require any element of error in sentencing, but only required the presence of an act. Barriers in law enforcement corporate actors who commit crimes in the environmental field can be seen that the provision of criminal sanctions against environmental pollution has not been a priority of the corporation criminal prosecution. To hold the principle of corporate criminal act without fault in the criminal law in force during this hamper law enforcement caused the laws of material criminal law in particular is still experiencing weakness because of the principle of accountability because of an error and against the law as a condition for the imposition of criminal.